



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KODE REKENING BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilaksanakan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi Pemerintah Desa dan permasalahan teknis belanja desa, perlu di inventarisir belanja desa dalam bentuk Kode Rekening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kode Rekening Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
7. Kode rekening belanja desa adalah kode yang merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menentukan jenis kegiatan dan jenis belanja desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menentukan Kode Rekening atas Belanja Desa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat untuk mensinkronkan proses Perencanaan penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja desa yang dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional, sehingga dalam pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati adalah Kode Rekening Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Lampiran I adalah Kode Rekening Belanja Desa Bidang Pemerintahan;
- b. Lampiran II adalah Kode Rekening Belanja Desa Bidang Pembangunan;
- c. Lampiran III adalah Kode Rekening Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Lampiran IV adalah Kode Rekening Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Lampiran V adalah Kode Rekening Belanja Tak Terduga;
- f. Lampiran VI adalah Belanja Pegawai;
- g. Lampiran VII adalah Belanja Barang dan Jasa; dan
- h. Lampiran VIII Belanja Modal.

Pasal 6

Kode Rekening Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) level yaitu :

- a. Level 1 (satu) adalah Belanja desa ditentukan dengan kode 2 (dua)
- b. Level 2 (dua) adalah Belanja Bidang, ditentukan dengan :
 1. kode 1 (satu) untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Kode 2 (dua) untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 3. kode 3 (tiga) untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. kode 4 (empat) untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Kode 5 (lima) untuk Bidang Tak Terduga.
- c. Level 3 (tiga) adalah penjabaran Belanja Bidang sebagaimana Ayat 2 yang terdiri dari 2 digit sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V.
- d. Level 4 (empat) adalah Kode Jenis Belanja Desa ditentukan dengan :
 1. Kode 1 (satu) untuk Belanja Pegawai;
 2. Kode 2 (dua) untuk Belanja Barang dan Jasa; dan

3. Kode 3 (tiga) untuk Belanja Modal.
- e. Level 5 (lima) adalah penjabaran Kode Jenis Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf d yang terdiri dari 2 digit sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, VII, dan VIII.

Pasal 7

Penerapan Kode Rekening Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 tertuang pada lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, *f*



URAY TAJUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KODE REKENING				JENIS KEGIATAN
2	1	01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan
2	1	02		Operasional Perkantoran
2	1	03		Operasional Badan Permusyawaratan Desa
2	1	04		Operasional RT/ RW
2	1	05		Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	06		Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	1	07		Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa
2	1	08		Kegiatan Penyusunan Profil Desa
2	1	09		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	10		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2	1	11		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	12		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	13		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	14		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Kantor Desa
2	1	15		Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa
2	1	16		Pengelolaan Informasi Desa
2	1	17		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
2	1	18		Penyusunan/ Review Dokumen RPJMDesa
2	1	19		Penyusunan Dokumen RKPDesa
2	1	20		Penyusunan Dokumen APBDesa
2	1	21		Penyusunan Produk Hukum Desa
2	1	22		Pemutakhiran Data Penduduk
2	1	23		Penyelenggaraan/ Fasilitasi Administrasi Kependudukan
2	1	24		Kegiatan Penyusunan Dok. Laporan Pengelolaan Keuangan Desa
2	1	25		Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu
2	1	26		Kegiatan Pengisian dan Pelantikan BPD Antar Waktu
2	1	27		Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
2	1	28		Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa
2	1	29		Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa
2	1	30		Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan BPD
2	1	31		Kegiatan Kerjasama Antar Desa
2	1	32		Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
2	1	33		Kegiatan Kajian Pendirian BUMDesa
2	1	34		Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Pemerintahan Desa dengan LKD
2	1	35		Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya
2	1	36		Kegiatan Pendataan Pertanahan
2	1	37		Kegiatan Penyusunan peraturan Desa Laporan pertanggungjawaban
2	1	38		Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Desa lainnya
2	1	39		Kegiatan pemilihan kepala Desa Antara Waktu
2	1	40		Kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa
2	1	41		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Pagar Kantor Desa
2	1	42		Penataan Organisasi Pemerintah Desa.
2	1	43		Penyusunan Tata Ruang Desa
2	1	44		Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
2	1	45		Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa

2	1	46		Pengembangan tata ruang Desa dan peta sosial Desa
2	1	47		Pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat Desa
2	1	48		Penetapan desa dalam KLB
2	1	49		Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa
2	1	50		Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyandang difabilitas
2	1	51		Kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja
2	1	52		Kegiatan Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa
2	1	53		Kegiatan Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa
2	1	54		Kegiatan Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa
2	1	55		Kegiatan Pendataan potensi Desa
2	1	56		Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa
2	1	57		Kegiatan Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa
2	1	58		Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa
2	1	59		Kegiatan Lomba Dusun/Desa/Kampung
2	1	60		Kegiatan Penguatan tugu batas desa
2	1	61		Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB
2	1	62		Kegiatan Penataan Batas Wilayah Dusun
2	1	63		Kegiatan Pemekaran Wilayah Dusun
2	1	64		Kegiatan Pemekaran Desa
2	1	65		Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
2	1	66		Kegiatan pemetaan nama-nama gang/RT/RW/Plang Desa
2	1	67		Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk
2	1	68		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	1	69		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2	1	70		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa
2	1	71		Kegiatan Penyediaan Jasa Pengguna Anggaran
2	1	72		Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	1	73		Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor
2	1	74		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan
2	1	75		Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat
2	1	76		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TANGGAL 29 JANUARI 2018
 TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

KODE REKENING				JENIS KEGIATAN
2	2	01		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa/Jalan Pemukiman
2	2	02		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan Desa
2	2	03		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
2	2	04		Kegiatan Pembangunan/Pelestarian/Pengelolaan/Pemanfaatan/ Penhijauan Lingkungan Hidup
2	2	05		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif
2	2	06		Kegiatan Pemeliharaan/Pengelolaan/Pelestarian Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum Desa
2	2	07		Pembangunan/Pemeliharaan Gudang Barang
2	2	08		Pembangunan/Pemeliharaan Poskamling
2	2	09		Pembangunan/Pemeliharaan/peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	2	10		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase
2	2	11		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2	2	12		Pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan dan Pemanfatan Tempat Pelelangan Ikan
2	2	13		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bersama (KUBE)
2	2	14		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Embung Desa
2	2	15		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Irigasi
2	2	16		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Steigher dan Jalan Menuju Steigher
2	2	17		Pembangunan/Pemeliharaan Dinding Penahan Tanah (DPT)
2	2	18		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Pintu Air
2	2	19		Pengadaan Sarana dan Prasarana Ambulance Desa
2	2	20		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa/Rumah Pintar
2	2	21		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pengelolaan/Pemanfaatan Gedung Serba Guna
2	2	22		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Box Culvert
2	2	23		Pembangunan/Pengadaan Gorong-gorong
2	2	24		Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Fogging
2	2	25		Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TTG
2	2	26		Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana
2	2	27		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2	2	28		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2	2	29		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan
2	2	30		Kegiatan/Pengadaan Alat/Pemeliharaan/Pemanfaatan Gotong Royong
2	2	31		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Gedung/Bangunan Satu Atap
2	2	32		Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat
2	2	33		Pembangunan/Pengembangan/Pengelolaan Sosial Budaya dan keagamaan
2	2	34		Pembangunan Tembok Penahan Tanah
2	2	35		Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan Taman Desa
2	2	36		Kegiatan Pembangunan, Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2	2	37		Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pemanfaatan sarana air Bersih dan Tata Air Mikro
2	2	38		Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/Peningkatan/Pengelolaan/Pemanfaatan Kegiatan dibidang Kesehatan
2	2	39		Kegiatan Pembangunan/pengelolaan taman Bacaan Masyarakat
2	2	40		Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa
2	2	41		Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/Peningkatan/Pengelolaan/Pemanfaatan Kegiatan dibidang Pendidikan
2	2	42		Kegiatan Pengembangan Usaha MIKRO berbasis Desa
2	2	43		Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Pengelolaan/Pemanfaatan/ Pemeliharaan/ Pengadaan Kegiatan dibidang Pertanian
2	2	44		Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Pengelolaan/Pemanfaatan/ Pemeliharaan/Pengadaan dibidang Peternakan ternak secara kolektif
2	2	45		Kegiatan Pengembangan/Pengelolaan/Pemanfaatan Wisata Desa
2	2	46		Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan usaha hutan desa
2	2	47		Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai
2	2	48		Kegiatan Pembangunan Pusat Pemberdayaan Masyarakat
2	2	49		Pengadaan/Pemeliharaan mesin mollen/mesin konstruksi
2	2	50		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pemanfaatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK
2	2	51		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pengelolaan Gedung TPQ, KB dan Rumah Penginapan
2	2	52		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan/Pemanfaatan/Pengelolaan Objek Wisata yang dikelola Desa
2	2	53		Pembangunan/Pengelolaan Sarana Prasarana Tempat Sampah
2	2	54		Rehabilitasi dan Rekontruksi Lingkungan Perumahan Yang Terkena Bencana Alam
2	2	55		Pengembangan/Pengelolaan Desa Siaga
2	2	56		Pelaksanaan/Evaluasi Perlombaan Desa
2	2	57		Pemberian Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Bedah Rumah
2	2	58		Pembangunan/Pengelolaan/Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
2	2	59		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gapura dan Batas Desa
2	2	60		Pengadaan Lampu Penerang Jalan Desa
2	2	61		Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
2	2	62		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin
2	2	63		Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat
2	2	64		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemasaran
2	2	65		Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana fisik
2	2	66		Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan
2	2	67		pengembangan energi terbarukan
2	2	68		Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitas Penerangan Jalan Desa
2	2	69		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa.
2	2	70		Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga)
2	2	71		Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs
2	2	72		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
2	2	73		Pemberian makanan/ minuman tambahan dan vitamin
2	2	74		Pembangunan/Pengadaan/Pengelolaan/Pemeliharaan/Pemanfaatan/Peningkatan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa

2	2	75		Fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di Desa
2	2	76		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pengadaan/Pengelolaan/Pemanfaatan rumah ibadah
2	2	77		Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis Desa
2	2	78		Pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2	2	79		Pengelolaan/Fasilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difabel dan disabel
2	2	80		Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya/
2	2	81		Pengelolaan Kelompok Usaha Ekonomi Mikro/Kecil
2	2	82		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan BUMDesa serta Penyertaan Modal Bumdes
2	2	83		Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES
2	2	84		Kegiatan Fasilitas Penerangan Jalan Desa dan Sarana Umum Lainnya
2	2	85		Pembangunan Rumah Tunggu
2	2	86		Kegiatan Pelestarian Rumah Adat
2	2	87		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana informatika dan Komonikasi
2	2	88		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
2	2	89		Pembangunan Sarana dan Prasarana Transpotasi
2	2	90		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pengadaan/Pemanfaatan/Peningkatan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan
2	2	91		Penunjang kegiatan Desa Inovatif
2	2	92		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pengadaan/Pengelolaan/Pemanfaatan jaringan website dan internet desa
2	2	93		Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pemanfaatan/Peningkatan Jaringan listrik
2	2	94		Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan/Pengelolaan/Peningkatan/Pemanfaatan Bangunan Desa Lainnya
2	2	95		Pembangunan Tanggul Penahan Air
2	2	96		Kegiatan Pengelolaan/Pengembangan Usaha Kecil Menengah Ibu Rumah Tangga dan Pasar Desa
2	2	97		Pembangunan/Pemeliharaan Sumur Resapan/Galian/Sumur Bor
2	2	98		Pembangunan Kegiatan Mobilitas Kependudukan
2	2	99		Kegiatan penunjang acara tradisi Adat Istiadat

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

KODE REKENING				JENIS KEGIATAN
2	3	01		Pembinaan/Pengelolaan/Pembentukan/ Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	3	02		Penyelenggaraan/ Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	03		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama
2	3	04		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan
2	3	05		Penyelenggaraan/ Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong Masyarakat
2	3	06		Fasilitasi Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat
2	3	07		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Olahraga
2	3	08		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat
2	3	09		Santunan bagi Masyarakat Tidak Mampu/ Jompo/ Muallaf
2	3	10		Fasilitasi Pendidikan bagi Pelajar Berprestasi
2	3	11		Fasilitasi Pendidikan bagi Pelajar Tidak Mampu
2	3	12		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan di Bidang Pertanian
2	3	13		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Desa
2	3	14		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional
2	3	15		Pembinaan/ Penyelenggaraan Event Olahraga Tradisional
2	3	16		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Perikanan
2	3	17		Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Perikanan
2	3	18		Fasilitasi Kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, Terlantar dan ODGJ
2	3	19		Fasilitasi Gerakan Penanaman Obat Keluarga (TOGA)
2	3	20		Fasilitasi Kegiatan P2TP2A
2	3	21		Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
2	3	22		Fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Perempuan
2	3	23		Fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Peduli ASI
2	3	24		Fasilitasi Kegiatan Sosial, Keagamaan, Olahraga, Seni Budaya, Pameran dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
2	3	25		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan di Bidang Perkebunan
2	3	26		Pembinaan/ Fasilitasi Kegiatan di Bidang Perternakan
2	3	27		Sosialisasi produk hukum desa
2	3	28		Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
2	3	29		Sosialisasi budaya masyarakat
2	3	30		Sosialisasi Ketenagakerjaan
2	3	31		Sosialisasi Pembangunan
2	3	32		Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah Raga
2	3	33		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Olahraga Melalui Senam
2	3	34		Bimtek Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
2	3	35		Pembinaan RT/ RW
2	3	36		Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
2	3	37		Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat
2	3	38		Kegiatan Pembinaan/ Penunjang Karang Taruna
2	3	39		Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Desa
2	3	40		Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
2	3	41		Kegiatan Pembinaan Rukun Kematian atau Sebutan Lainnya
2	3	42		kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2	3	43		Pendataan dan pemetaan kawasan lindung dan konservasi skala Desa

2	3	44		Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa
2	3	45		Fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan Desa
2	3	46		Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat
2	3	47		Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa
2	3	48		Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa
2	3	49		Pengelolaan kelompok bina keluarga
2	3	50		Pembinaan/Fasilitasi/Penyuluhan keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana dan Akseptor Keluarga Berencana
2	3	51		Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa
2	3	52		Penyelenggaraan olah raga tingkat Desa
2	3	53		Pemanfaatan Lahan Pekarangan
2	3	54		Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggara Seni Budaya
2	3	55		Promosi Unggulan Desa
2	3	56		Pengembangan Keolahragaan
2	3	57		Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS
2	3	58		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2	3	59		Kegiatan Sosialisasi Media
2	3	60		Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
2	3	61		Keg. Sosialisasi Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme
2	3	62		Kegiatan Santunan Jompo
2	3	63		Kegiatan Kelompok Nelayan
2	3	64		Pembinaan kegiatan LPM
2	3	65		Pengembangan seni budaya dan keagamaan
2	3	66		Pembinaan/Pemberdayaan Trantibmas
2	3	67		Pelatihan Kader PKK tentang Dasa Wisma dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
2	3	68		Pembinaan/Penunjang Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
2	3	69		Pembinaan Kepada Kelompok Masyarakat Desa
2	3	70		Pembinaan Lembaga Adat
2	3	71		Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (anak PAUD)
2	3	72		Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (Posyandu)
2	3	73		Peningkatan kesehatan ibu hamil
2	3	74		Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
2	3	75		Bantuan pemberdayaan kegiatan olahraga
2	3	76		Bantuan Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat
2	3	77		Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah
2	3	78		Informasi dan Pendidikan Masyarakat
2	3	79		Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat
2	3	80		pembinaan kreatifitas pemuda
2	3	81		kegiatan pemuda dan olah raga
2	3	82		Penguatan kapasitas kelompok tani
2	3	83		Pembentukan, fasilitasi dan pelatihan kelompok
2	3	84		Penunjang Kegiatan Pendidikan
2	3	85		Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Siswa Berprestasi
2	3	86		Penunjang Kegiatan Kesehatan
2	3	87		Fasilitasi/Penunjang/Pelestarian Kegiatan Adat, Budaya dan Agama
2	3	88		Pembinaan/Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan
2	3	89		Pembinaan Organisasi Dan Kegiatan Pemuda Desa
2	3	90		Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan masyarakat Desa
2	3	91		Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga
2	3	92		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid

2	3	93			Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Pemuda
2	3	94			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan
2	3	95			Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
2	3	96			Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Hari Besar Keagamaan
2	3	97			Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes dan Polindes
2	3	98			Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa
2	3	99			Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE REKENING				JENIS KEGIATAN
2	4	01		Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat
2	4	02		Peningkatan Kapasitas bagi BPD
2	4	03		Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	4	04		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa ke Luar Daerah
2	4	05		Peningkatan Kapasitas bagi Tim PTPKD
2	4	06		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa ke Perguruan Tinggi
2	4	07		Sosialisasi Pembentukan BUMDesa
2	4	08		Peningkatan Kapasitas dan Manajemen BUMDesa
2	4	09		Penyuluhan/ Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat
2	4	10		Peningkatan Kapasitas bagi Tim Updating Profil Desa
2	4	11		Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Perempuan
2	4	12		Peningkatan Kapasitas Bidang Keagamaan
2	4	13		Peningkatan Kapasitas Bidang Seni dan Budaya
2	4	14		Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2	4	15		Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa
2	4	16		Kegiatan Pelatihan Produksi dan Packaging Produk Desa
2	4	17		Kegiatan Promosi Produk Unggulan Desa
2	4	18		Penyuluhan Tentang Bahaya NAPZA di Desa
2	4	19		Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan
2	4	20		Kegiatan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata
2	4	21		Sosialisasi Pendaftaran dan Perizinan Kapal Perikanan di bawah 10 GT
2	4	22		Pelatihan Kader Vaksinator Bidang Perternakan
2	4	23		Pelatihan Keur Master (Penanganan Pemetongan Hewan)
2	4	24		Pelatihan dan Pembinaan Agribisnis Bagi Kelompok Tani
2	4	25		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2	4	26		Peningkatan Kapasitas Tim Literasi Pertanian Berbasis IT
2	4	27		Pelatihan dan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2	4	28		Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
2	4	29		Bedah Rumah bagi Masyarakat Miskin
2	4	30		Penyuluhan Program Terpadu P2WKSS
2	4	31		Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan bagi Kader Satgas Desa P2TP2A
2	4	32		Peningkatan Kapasitas Kepada TIM Penanggulangan Bencana Desa
2	4	33		Pengembangan Kapasitas bagi Tim Kampung KB Desa
2	4	34		Sosialisasi/ Pelatihan Terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
2	4	35		Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)
2	4	36		Pelatihan Pengembangan Program Inovasi Desa (PID)
2	4	37		Pelatihan Wawasan Kebangsaan untuk Wilayah Perbatasan Antar Ne
2	4	38		Peningkatan Kapasitas Bidang Petanian
2	4	39		Peningkatan Kapasitas Bidang Peternakan
2	4	40		Peningkatan Kapasitas Bidang Perkebunan
2	4	41		Peningkatan Kapasitas Bidang Olah Raga
2	4	42		Peningkatan Kapasitas Bidang Ekonomi Produktif
2	4	43		Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	4	44		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2	4	45		Penyelenggaraan Musyawarah RPJMDesa
2	4	46		Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa
2	4	47		Penyelenggaraan Musyawarah APBDesa

2	4	48		Penyelenggaraan Musyawarah LPj, LKPPD, LPPD
2	4	49		Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan Produk Hukum Desa
2	4	50		Sosialisasasi dan motivasi masyarakat
2	4	51		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
2	4	52		Penggalangan partisipasi masyarakat
2	4	53		Kegitan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
2	4	54		Penunjang Kegiatan PSM dan SIDUMAS
2	4	55		Kegiatan pelatihan / peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
2	4	56		Kegiatan Study Banding bagi Pemerintah Desa, BPD dan LKD
2	4	57		Kegiatan Lomba Desa
2	4	58		Pemberian Modal bagi Karang Taruna
2	4	59		Peningkatan Usaha Pemuda
2	4	60		Pemberdayaan Penyelenggaraan Jenazah
2	4	61		Pesta Rakyat
2	4	62		Peningkatan Kapasitas TPK
2	4	63		Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
2	4	64		Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Des

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BIDANG TAK TERDUGA

KODE REKENING				JENIS KEGIATAN
2	5	01		Penanggulangan Wabah penyakit
2	5	02		Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
2	5	03		Penanggulangan Kebakaran Pasar Desa/ Tempat Umum dalam Skala Besar
2	5	04		Keadaan Darurat Lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA PEGAWAI

KODE REKENING					JENIS BELANJA
*	*	**	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
*	*	**	1	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
*	*	**	1	03	Tunjangan Jabatan Kepala Desa
*	*	**	1	04	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa
*	*	**	1	05	Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa
*	*	**	1	06	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
*	*	**	1	07	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa
*	*	**	1	08	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa
*	*	**	1	09	Tambahan Tunjangan Jabatan Kepala Desa
*	*	**	1	10	Tambahan Tunjangan Jabatan Perangkat Desa
*	*	**	1	11	Tambahan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa
*	*	**	1	12	Belanja Pegawai lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA BARANG DAN JASA

KODE REKENING				JENIS BELANJA	
*	*	**	2	01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
*	*	**	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor
*	*	**	2	03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
*	*	**	2	04	Belanja Benda Pos dan Materai
*	*	**	2	05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
*	*	**	2	06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
*	*	**	2	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
*	*	**	2	08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
*	*	**	2	09	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
*	*	**	2	10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
*	*	**	2	11	Belanja Sewa Peralatan
*	*	**	2	12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
*	*	**	2	13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
*	*	**	2	14	Belanja Honorarium Tim Panitia
*	*	**	2	15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
*	*	**	2	16	Belanja Perjalanan Dinas
*	*	**	2	17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
*	*	**	2	18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
*	*	**	2	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
*	*	**	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
*	*	**	2	21	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
*	*	**	2	22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
*	*	**	2	23	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor
*	*	**	2	24	Belanja Insentif RT/ RW/ Kepala Adat
*	*	**	2	25	Belanja Nomor Rumah
*	*	**	2	26	Belanja Peta Desa
*	*	**	2	27	Belanja Plang Bersama Kantor Desa dan LKD
*	*	**	2	28	Belanja Papan Batas RT, Jalan dan Papan Tanda
*	*	**	2	29	Belanja Plang Lembaga
*	*	**	2	30	Belanja Entri Data Prodeskel
*	*	**	2	31	Belanja Honor Tim Pendataan Desa (Lampid)
*	*	**	2	32	Belanja Penyusunan RKP Desa
*	*	**	2	33	Belanja Penyusunan APB Desa/ APB Desa Perubahan
*	*	**	2	34	Belanja Penyusunan RPJM Desa
*	*	**	2	35	Belanja Papan Informasi
*	*	**	2	36	Belanja Baliho/ Banner Informasi
*	*	**	2	37	Belanja Pemeliharaan Website Desa/ Server
*	*	**	2	38	Belanja Honorarium Kegiatan
*	*	**	2	39	Belanja Penyusunan LPJ, LKPPD dan LPPD
*	*	**	2	40	Belanja Pengelolaan Keuangan Desa
*	*	**	2	41	Belanja Uang Makan
*	*	**	2	42	Belanja Uang Saku
*	*	**	2	43	Belanja Uang Transport
*	*	**	2	44	Belanja Uang Penginapan
*	*	**	2	45	Belanja Iuran BPJS Perangkat Desa dan BPD
*	*	**	2	46	Belanja Insentif Kader Yandu
*	*	**	2	47	Belanja Santunan Kepada Dukun Beranak Mitra Bidan Desa
*	*	**	2	48	Belanja Kegiatan Posyandu Lansia
*	*	**	2	49	Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita

*	*	**	2	50	Belanja Spanduk Kegiatan
*	*	**	2	51	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Siswa Tidak Mampu
*	*	**	2	52	Belanja Bantuan Pendidikan Kepada Siswa Berprestasi
*	*	**	2	53	Belanja Hadiah Motivasi Bagi Pelajar Sebagai Juara Kelas
*	*	**	2	54	Belanja Santunan Amil
*	*	**	2	55	Belanja Santunan Guru Ngaji
*	*	**	2	56	Belanja Kegiatan LPTQ
*	*	**	2	57	Belanja Kegiatan BKMT
*	*	**	2	58	Belanja Kegiatan Remaja Masjid/ Surau
*	*	**	2	59	Belanja Kegiatan Fardhu Kifayah
*	*	**	2	60	Belanja Santunan Kaum Dhuafa
*	*	**	2	61	Belanja Pakaian Pengurus
*	*	**	2	62	Belanja Jasa Pengawas
*	*	**	2	63	Belanja Honor Tim
*	*	**	2	64	Belanja Penggandaan Modul Kegiatan
*	*	**	2	65	Belanja Jasa Petugas Kebersihan
*	*	**	2	66	Belanja Makan Minum Kegiatan
*	*	**	2	67	Belanja Bantuan Kegiatan Lomba Antar Desa
*	*	**	2	68	Belanja Bantuan Bahan Kegiatan
*	*	**	2	69	Belanja Seragam Kegiatan
*	*	**	2	70	Belanja Jasa Keamanan
*	*	**	2	71	Belanja Kegiatan PHBA
*	*	**	2	72	Belanja Kegiatan PHBN
*	*	**	2	73	Belanja Kegiatan TPA/ TPQ
*	*	**	2	74	Belanja Kegiatan Budaya Masyarakat
*	*	**	2	75	Belanja Bantuan Kepada Organisasi Desa
*	*	**	2	76	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan
*	*	**	2	77	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Kantor
*	*	**	2	78	Belanja Makan dan Minum
*	*	**	2	79	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran
*	*	**	2	80	Belanja Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
*	*	**	2	81	Belanja Bantuan uang kepada masyarakat
*	*	**	2	82	Belanja Insentif LPM
*	*	**	2	83	Belanja Insentif Karang Taruna
*	*	**	2	84	Belanja Insentif PKK
*	*	**	2	85	Bantuan petugas pemakaman
*	*	**	2	86	Belanja Insentif Guru PAUD
*	*	**	2	87	Belanja langgaran Majalah/Koran
*	*	**	2	88	Belanja Bantuan Pendidikan Kepada Aparatur Pemerintah Desa
*	*	**	2	89	Belanja Barang dan Jasa lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING BELANJA MODAL

KODE REKENING					JENIS BELANJA
*	*	**	3	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
*	*	**	3	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
*	*	**	3	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
*	*	**	3	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
*	*	**	3	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
*	*	**	3	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
*	*	**	3	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
*	*	**	3	08	Belanja Modal Tanah Lainnya
*	*	**	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
*	*	**	3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
*	*	**	3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
*	*	**	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
*	*	**	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
*	*	**	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
*	*	**	3	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
*	*	**	3	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
*	*	**	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
*	*	**	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
*	*	**	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
*	*	**	3	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
*	*	**	3	21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
*	*	**	3	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
*	*	**	3	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
*	*	**	3	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
*	*	**	3	25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
*	*	**	3	26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
*	*	**	3	27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
*	*	**	3	28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
*	*	**	3	29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
*	*	**	3	30	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
*	*	**	3	31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
*	*	**	3	32	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
*	*	**	3	33	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
*	*	**	3	34	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
*	*	**	3	35	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
*	*	**	3	36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
*	*	**	3	37	Belanja Modal Material Bangunan
*	*	**	3	38	Belanja Modal Pengadaan Laptop
*	*	**	3	39	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan
*	*	**	3	40	Belanja Modal Pengadaan Genset
*	*	**	3	41	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
*	*	**	3	42	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Gotong Royong
*	*	**	3	43	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
*	*	**	3	44	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas
*	*	**	3	45	Belanja Modal Lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TANGGAL 29 JANUARI 2018
TENTANG KODE REKENING BELANJA DESA

PENERAPAN KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING					JENIS BELANJA
2	1	01	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
2	1	01	1	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
2	1	02	1	03	Tunjangan Jabatan Kepala Desa
2	1	02	2	07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Operasional Perkantoran
2	1	08	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penyusunan Profil Desa
2	1	06	3	12	Belanja Alat Ukur pada kegiatan Pembangunan Jembatan Desa
dst.					

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI